

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala selama 5 minggu sejak tanggal 7 April 2025 hingga 10 Mei 2025 adalah:

1. Calon apoteker dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar
2. Calon apoteker dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana Kesehatan seperti apotek sesuai dengan kode etik kefarmasian
3. Calon apoteker harus selalu mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan nilai Peduli, Komit, Antusias (PeKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia

5.2 Saran

Saran bagi mahasiswa calon apoteker setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala selama 5 minggu sejak tanggal 7 April 2025 hingga 10 Mei 2025 adalah:

1. Mahasiswa calon apoteker hendaknya lebih mempersiapkan diri dengan lebih banyak belajar dan mencari informasi terkait macam obat-obatan yang sering digunakan dalam swamedikasi sehingga

dapat memberikan konseling, informasi maupun edukasi yang benar kepada pasien

2. Mahasiswa calon apoteker harus aktif bertanya dalam melaksanakan PKPA serta berdiskusi dengan pembimbing agar mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker pada pelayanan kefarmasian di apotek
3. Mahasiswa calon apoteker mampu mempelajari berbagai macam obat berdasarkan kelas terapi, cara penggunaan, dan lain sebagainya agar dapat menunjang pelayanan kefarmasian yang lebih baik kepada pasien

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik*. Jakarta: BPOM RI.
- Brayfield, A. 2009, Martindale: The Complete Drug Reference 36th edition, London: Pharmaceutical Press
- British National Formulary (BNF) 83th edition. 2022, London: Royal Pharmaceutical Society
- British National Formulary (BNF) 85th edition. 2023, London: Royal Pharmaceutical Society
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran Obat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, dan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Klinik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- McEvoy, G.K., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacists, Maryland
- Pemerintah Indonesia, 2023. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Republik Indonesia, Jakarta
- Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- United States Pharmacopeial Convention. (2019). *United State Pharmacopeia 42 – National Formulary 37 (USP 42–NF 37)*. Rockville, MD: United States Pharmacopeial Convention.
- Walsh, C.T. & Schwartz-Bloom, R.D., 2005. *Levine's Pharmacology: Drug Actions and Reactions*. 7th edn. London & New York: Taylor & Francis Group.

Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M., Flower, R.J. & Henderson, G., 2020.
Rang and Dale's Pharmacology. 9th edn. Edinburgh: Elsevier.

Katzung, B.G., Vanderah, T.W. & Kruidering-Hall, M. (eds.) (2018) Basic
and Clinical Pharmacology. 14th ed. New York: McGraw-Hill
Education.